

Cendekiawan Muslim: Antara Teori Dan Tindakan Praksis (1)

Agen Perubahan & Demokratisasi



AVANG UTIRIZA YAKIN, MA, PhD
Dosen FSH UI Jakarta,
Wakil Ketua LTM-PBN,
dan Peneliti Prosodoktoral
Université Catholique de
Louvain (UCLouvain),
Belgia

KELAS menengah merupakan kelompok masyarakat yang cukup kuat, berkepentingan, berani, gigih, dan berkesinambungan menurut pemerintah bekerja dengan tanggap dan bertanggungjawab bagi kepentingan rakyat.

Kelas menengah telah menjadi agen perubahan, bahkan demokratisasi, di negara-negara dunia ketiga. Ia memainkan peran cukup penting sebagai kelompok kritis dan pengkritik fasih bagi rejim zalim.

Di antara elemen kelas menengah yang cukup vokal adalah, kalangan kesekelompok atau intelektual. Cendekiawan merupakan nama yang merujuk pada orang-orang yang memiliki kepribadian sosial dan ingin melakukan sesuatu untuk kelompok masyarakat yang tertinggal oleh derap

lajunya pembangunan.

Di antara cendekiawan ini, ada yang bisa kita sebut sebagai cendekiawan Muslim. Kata Muslim ini untuk mempermudah identifikasi persoalan ketimbang melakukan sekat-sekat dan mendirikan bilik-bilik di kalangan cendekiawan.

La merujuk pada sekelompok orang yang melakukan penyebaran wacana Islam yang lebih toleran, terbuka, demokratis, dan majemuk. Cendekiawan Muslim ini dapat berbentuk perorangan, jaringan, kelompok atau pusat kajian, baik yang berdiri sendiri atau di bawah universitas atau organisasi keagamaan atau lembaga swadaya masyarakat.

Di antara kalangan cendekiawan ini, dapat lagi dikategorikan sesuai corak pemikiran mereka: transformatif, moderat, liberal, tradisional, dan lain sebagainya. Tetapi, di sini saya ingin membagi hanya dua kategori cendekiawan: mereka yang berkuat hanya di dunia gagasan atau teori (menulis, meneliti, dan mengajar) dan mereka yang melaksanakan gagasan tersebut dalam tindakan praksis kehidupan keseharian masyarakat (terjun ke masyarakat untuk merubah dan memberikan sesuatu).

Yang pertama saya sebut cendekiawan Muslim teoritis dan yang kedua cendekiawan Muslim praksis. ■ Bersambung

Astaga, Anak Korban Perkosaan Bisa Dipenjarakan Lagi

PADA 27 Agustus lalu, Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan lepas terhadap WA, anak perempuan 15 tahun yang dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan oleh PN Muara Bulian. Kasusnya, karena melakukan aborsi terhadap kandungan hasil perkosaan yang dilakukannya.

Majelis Hakim PT Jambi dalam putusan ini menilai bahwa WA melakukan aborsi karena adanya pengaruh "daya paksa", sehingga perbuatan WA tidak dapat dipidana. Namun belakangan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari berencana untuk mengajukan kasasi atas putusan PT Jambi itu.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Sawahjua mempertanyakan alasan jaksa mengajukan kasasi ini. Berkaca dari kasus perkosaan yang menimpa WA, putusan banding kakak WA yang merupakan pelaku perkosaan pun juga akan dikasasi dengan alasan penghukuman yang jauh dari tuntutan.

Menurutnya, alasan pengajuan kasasi tidak tepat hanya dari perspektif penghukuman. "Hakikat dari pemeriksaan di proses kasasi adalah mengenai pemenuhan kesalahan penerapan hukum di putusan sebelumnya, bukan hanya terkait lamanya hukuman," katanya, kemarin.

ICJR menilai, penerapan hukum yang salah justru terjadi dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama. Banyak hak-hak WA sebagai korban perkosaan dan anak yang berbenturan dengan hukum yang berlaku dalam proses ini. Mulai dari terlanggarnya hak atas bantuan hukum yang efektif, hak atas penahanan sebagai upaya terakhir, hak bebas dari penyiksaan dan hak untuk menghidrasi saksi dan/atau ahli yang meriangkan.

Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi harus mampu menghadirkan alasan penerapan hukum mana yang salah dalam putusan lepas WA. "Yang paling penting, Penuntut Umum harus menjabarkan keadilan bagi WA. Tak hanya fokus pada penghukuman. Karena

WA dalam hal ini sebenarnya merupakan korban, yang hak-haknya dijamin peraturan perundang-undangan," ujar Anggara.

Hukum pidana di dalam kasus yang melibatkan korban seperti kasus WA tidak dapat diterapkan secara hitam dan putih. "Seharusnya, jaksa bisa melihat bahwa yang dibutuhkan WA dalam hal ini adalah keadilan dalam bentuk rehabilitasi, bukan pemidanaan semata," imbuhnya.

Anggara menambahkan, selain tidak teliti dalam menganalisis posisi WA dalam kasus ini sebagai seorang korban, Penuntut Umum juga gagal dalam memahami dan menerapkan kasus tepat ketentuan Pasal 48 KUHP. Dimana Penuntut Umum harus mampu mengaiti nilai keadilan dalam setiap kasus lewat pasal ini, bukan hanya berfokus pada lamanya hukuman.

ICJR mendorong Mahkamah Agung untuk masuk permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari, Jambi tersebut. Kemudian, meminta Mahkamah Agung untuk masuk permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari, Jambi tersebut. "Hakikat dari pemeriksaan di proses kasasi adalah mengenai pemenuhan kesalahan penerapan hukum di putusan sebelumnya, bukan hanya terkait lamanya hukuman," katanya, kemarin.

ICJR menilai, penerapan hukum yang salah justru terjadi dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama. Banyak hak-hak WA sebagai korban perkosaan dan anak yang berbenturan dengan hukum yang berlaku dalam proses ini. Mulai dari terlanggarnya hak atas bantuan hukum yang efektif, hak atas penahanan sebagai upaya terakhir, hak bebas dari penyiksaan dan hak untuk menghidrasi saksi dan/atau ahli yang meriangkan.

Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi harus mampu menghadirkan alasan penerapan hukum mana yang salah dalam putusan lepas WA. "Yang paling penting, Penuntut Umum harus menjabarkan keadilan bagi WA. Tak hanya fokus pada penghukuman. Karena



PAKE TOPENG:
Sejumlah aktivis berunjuk rasa merespons polemik aset Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di depan DPP Partai Demokrat Jakarta, kemarin. Mereka menuntut pengembalian aset Kemenpora yang diduga digondol mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

DWI PRABUDIPRATYAKA MERDEKA

Dokumen TPF Susah Dibuka

Kasus Munir Tambah Buram

Penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, masih tidak jelas. Begitu juga dengan keberadaan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

TIM Advokasi Kasus Munir mendesak pemerintah mengemukakan isi dokumen tersebut. Mereka juga menemup jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP). Pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Negara (Setneg) melakukan perlawanan hingga upaya kasasi di Mahkamah Agung (MA), Belakangan, MA dalam putusannya memenangkan pemerintah. Akibatnya, keberadaan dokumen TPF Kasus Munir semakin tidak jelas.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Petri Kanesia menyayangkan pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang menyebut

kasus Munir sudah selesai. Lantaran terpidana pembunuhan Munir, Polycarpus Budihari Priyanto, sudah diumumkan penja.

"Penyelesaian kasus Munir belum selesai, apalagi jika kita tidak tau isi dokumen TPF," katanya di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro no. 74, Jakarta. Pihaknya terus mendesak pemerintah untuk mengemukakan dokumen TPF tersebut ke publik.

Pada Februari 2016, pihaknya sudah menyurati Setneg untuk mencari keberadaan dokumen TPF Kasus Munir. Jawaban Setneg cukup mengecewakan, dokumen tersebut tidak ada di Setneg. Tidak puas dengan

respon itu, KontraS yang tergabung dalam Tim Advokasi Kasus Munir mengajukan permohonan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam sidang ajidikasi di KIP, bekas anggota TPF mengaku sudah menyerahkan dokumen TPF sebanyak 7 rangkap ke Presiden SBY pada 24 Juni 2005. KIP belakangan memutuskan bahwa dokumen tersebut harus dibuka ke publik. Sementara Setneg bersikukuh tidak memiliki dokumen itu dan tidak wajib mengemukakan ke publik.

Di tengah situasi tersebut, Presiden RI kelima, SBY, menyerahkan salinan dokumen TPF Kasus Munir ke pemerintah. "TPF ini dibentuk berdasarkan Kepres no. 111 tahun 2004, ada anggaran negara yang digunakan oleh TPF dan ada kepentingan publik disana, lalu kita meyakini kelanjutan kasus Munir

bergantung dokumen tersebut," kata Putri.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jember, Bivirri Susanti menenangkan, dari aspek hukum administrasi negara putusan kasasi MA jelas menguatkan putusan PTUN Jakarta. "Putusan PTUN ini tidak menguntungkan pengungkapan kasus Munir," sebutnya.

Dia menilai, informasi publik masih dimaknai secara sempit. Misalnya, informasi publik dipahami sebagai informasi seputar penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara/badan publik. Sementara dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam kasus dokumen TPF ini, Bivirri berpendapat, Setneg ingin membedakan pemerintahan yang lalu dengan pemer-

intahan yang sekarang. "Secara ketatanegaraan, pemerintahan dianggap satu lembaga. Seperti lembaga kepresidenan, mau presiden berganti tetap ada tanggung jawab pengelolaan dokumen negara," jelasnya.

Dosen hukum pidana Universitas Pancasila, Rocky Marbun menyebutkan, dari putusan Peninjauan Kembali (PK) kasus Munir dengan terpidana Polycarpus ternyata putusan itu tidak berdasarkan pada hasil temuan TPF. "Jadi dakwaan jaksa cuma dibangun dengan asumsi, ini dakwaan yang sangat lemah," katanya.

Jika dokumen TPF dinyatakan hilang, maka perbuatan menghilangkan dokumen itu bisa merupakan tindakan pidana.

"Jika ingin mengugat, mungkin bisa gugat perbuatan melawan hukum terlebih dahulu setelah itu baru pidana," tandasnya. ■ OSP



LINDUNGI SATWA LIAR: Pegiat lingkungan hidup yang tergabung dalam Pro Fauna melakukan aksi teatrikal untuk memperingati Hari Kakatua Indonesia, di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, kemarin. Selain menyatakan dukungan terhadap Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2018 tentang perlindungan satwa, mereka juga menyerukan kepada masyarakat untuk tidak membeli burung kakatua karena termasuk satwa yang dilindungi.

Duh, Pemerintah Serius Nggak Lindungi Satwa

MEMPERINGATI Hari Kakatua Indonesia pada 16 September, ProFauna, sebagai organisasi perlindungan hutan dan satwa liar meminta pemerintah serius melindungi satwa. Khususnya satwa liar dan langka.

ProFauna menyoroti revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) no. 20 tahun 2018 yang mengeluarkan 3 spesies burung dari daftar satwa dilindungi. Diduga, revisi ini dilakukan lantaran tekanan dari kelompok pecinta burung.

Juru kampanye ProFauna Indonesia, Afrizal Abdi menuturkan, beberapa bulan lalu pemerintah telah mengundurkan Permen LHK nomor 20 tahun 2018. Peraturan tersebut meng-

antarkan lampiran Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1999 tentang Pengawasan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Di dalam peraturan tersebut memuat 921 jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, dimana 562 satwa atau 61 persen isi daftar tersebut adalah jenis burung. Jenis satwa dilindungi dalam peraturan ini salah satunya adalah Burung Nuri dan Kakatua. Namun, belum lama setelah peraturan tersebut dikeluarkan, pemerintah merevisi daftar satwa dilindungi yang sudah tercantum di Permen LHK 20 tersebut.

"Ironisnya, dua bulan pasca disahkan, pemerintah malah mengeluarkan tiga spesies burung dari daftar satwa dilindungi," ujarnya, kemarin. Ketiga satwa tersebut yakni Jalak Suren (Corychus malabaricus), Cucak Rawa (Pycnonotus zeylanicus).

Pihaknya mengkritik revisi Permen LHK tersebut lantaran merupakan kemunduran sekaligus ancaman bagi dunia konservasi satwa. "Bisa saja kemudian ada yang menuntut jenis-jenis

lain termasuk Kakatua dan Nuri yang banyak diminati pembeli burung untuk diimpor dan dikeluarkan dari daftar satwa dilindungi," sebutnya.

Untuk diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan burung Mural Batu (Kucica Hutu), Jalak Suren, dan Cucak Rawa tidak lagi dimasukkan dalam daftar satwa dilindungi. Sebelumnya, tiga jenis burung itu masuk dalam Peraturan Menteri LHK no. 20 tahun 2018.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djari Witjaksono Hadi mengatakan, perubahan lampiran peraturan menteri yang berisi daftar tumbuhan dan hewan dilindungi itu sudah di-

Nasdem Vs Rizal Ramli Kritik Kok Malah Dibalas Somasi

SOMASI yang dilakukan Partai Nasdem terhadap Rizal Ramli, anggota Ketua Dewan Pembina Laskar Ampara, Arief Rachman Hakim Angkatan 66, H Alex Sato Bya, Mesinya, partai tak usah marah jika dikritik.

"Nggak usah somasi segala. Kalau memang yang diomongin Rizal Ramli tidak benar, ya dibantah saja dengan pernyataan. Kalau sebentar-sebentar dikritik lalu somasi, apa artinya demokrasi di negara kita," kata mantan Jaksa Agung Muda ini.

Alex mengungkapkan, untuk membantu semua itu lebih baik diadakan semacam debat publik antara buku Nasdem dengan Rizal Ramli. Bagusnya lagi Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita juga hadir. Itu baru montap.

Dengan begitu, publik bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak.

Seperti diketahui, Nasdem merasa dirugikan atas komentar Rizal Ramli di sebuah acara stasiun televisi swasta nasional 6 September lalu. Rizal menyebut Presiden Jokowi tidak benar mengengut Mendag Enggartiasto Lukita karena takut Kepala Ketua Nasdem Surya Paloh.

"Jadi biang kemunya sebetulnya saudara Enggar. Cuma Presiden Jokowi nggk bener negor, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek. Impor naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, ditambah dirugikan dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogeti mereka ini, pada main dari komisi, dari importir yang sedemikian besarnya," demikian pernyataan Rizal.



H Alex Sato Bya

Alex merasa ada yang salah dengan kebijakan impor pemerintah. Dengan banyaknya impor, petani banyak dirugikan. Misalnya saja garam. Padahal, Indonesia terkenal negara kelautan. Heran saja kalau garam pun masih harus impor. Apa yang salah di sini.

Dia juga melihat belum adanya koordinasi yang utuh soal impor. Yang satu Kementerian masih ingin impor, yang satu lagi tidak mau. Dia meminta Presiden Jokowi lebih tegas lagi kepada bawahannya.

Apalagi di tahun politik sekarang, masalah impor bisa mempengaruhi elektabilitas Jokowi. Eks Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Sumatera bagian Selatan ini mengangap ada kelemahan di tim ekonomi Jokowi.

Kendati begitu, terkait polemik nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Alex setuju dengan keinginan pemerintah yang menghentikan impor produk yang tak terfatur penuh. "Impor mobil mewah distop aja. Termasuk proyek-proyek pemerintah yang menghabiskan dollar banyak sudah seharusnya dihentikan dulu, apalagi yang baru rencana," pungkasnya. ■ JON

53699507
53671716
5353156

IKLAN ANDA

Cendekiawan Muslim: Antara Teori Dan Tindakan Praksis (2) Kaum Elitis Yang Menggali Kubur Sendiri



AVANG UTIRZA YAKIN MA, PhD
Dosen FSH UN Jakarta,
Wakil Ketua LTM-PBNJ,
dan Peneliti Prosdoktoral
Université Catholique de
Louvain (UCLouvain),
Belgia

CENDEKIAWAN Muslim teoris (CMT) telah menyebarkan gagasan Islam yang menyentak kesadaran dan pemahaman umat Islam pada umumnya, kalangan radikal dan fundamentalis khususnya. Ia menyumbang pada penyeragaman kembali pemahaman agama Islam.

Dengan sekongan intelektual dan berkah dana yang mengalir dari luar negeri atau dari pemerintah (sebagai mitra kerja), mereka tampil gagah dan terus mengkritik praktik Islam yang dalam pandangan mereka sudah membeku, ketinggalan zaman, bahkan membosankan.

Kendati demikian, sayang, wacana para cendekiawan Muslim teoris ini tidak membunuh, bahkan kontraproduktif dengan umat Islam pada umumnya. Apalagi kalangan akar rumput atau aras bawah.

Memang ini adalah risiko sebuah perjuangan dari sikap dan posisi yang diambil. Tapi paling tidak, perjuangan mereka tidak bisa dikatakan sebagai perjuangan umat Islam. Karena terlalu elitis, sedikit pangkah, dan antikritik. Ini tentu sama dengan lembaga lubang kubur sendiri. Bukan simpati yang diraih, tapi malah antipati umat yang diperoleh.

Tak perlu menjadi elitis. Karena ujung-ujungnya akan menjadi pendukung kebijakan Negara. Seperti dukungan terhadap beberapa peraturan pemerintah yang merugikan

rakyat. Padahal ini jelas hanya kepentingan elit dan kelompok tertentu saja.

Visi transformatif kalangan CMT masih bersifat gagasan, dan sama sekali belum menyentuh rakyat kebanyakan. CMT tidak punya akses, apalagi di kalangan akar rumput umat Islam. Bagaimana mungkin bisa masuk ke akar rumput, justru yang terakhir ini selalu menjadi bulan-bulanan kritik para CMT.

Para cendekiawan Muslim teoris ini masih bercanda ria dengan pemikiran dan gagasan yang jauh dari kenyataan obyektif rakyat Indonesia. Kepedulian terhadap korban banjir, bencana alam, yang dalam hujah (argumentasi) mereka bukan ranah mereka saja kurang Nampak. Apalagi mengenai tugas kemiskinan. Apalagi menjerakan masyarakat yang menjadi kantong potensial persemaian benih-benih fundamentalisme.

Dengan demikian, lagi-lagi urusan kaum fakir-miskin ditangani oleh gerakan yang selamanya diidentifikasi sebagai fundamentalis, radikal atau ekstrimis.

Fenomena ini mengingatkan saya kepada sekelompok elit intelektual di Mesir yang tidak punya akses ke akar rumput dan pemikiran mereka tidak membunuh. Akhirnya, urusan rakyat miskin Mesir diurus Ikhwani Muslimin, kelompok yang dikenal dengan fundamentalis dan radikal.

Suka atau tidak suka, Ikhwani memiliki jaringan luar biasa di Mesir. Dengan program pendidikan dan kesehatan, mereka melakukan aksi nyata. Ikhwani mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui lembaga pendidikan yang mereka miliki dan kesehatan.

Mereka memberi layanan kesehatan lewat rumah sakit dan klinik yang mereka punyai. Paling tidak, ini adalah pengalaman dan pondasi mata saya ketika berada di Mesir, pada 2001-2002, saat "mampir" menjadi mahasiswa S-2 di Universitas Al-Azhar, Kairo. ■ Bersembang



NYARI KERJA:
Sejumlah pencari kerja mencari lowongan pekerjaan pada acara Bursa Kerja Terbuka 2018, di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Bursa kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur itu diikuti 70 perusahaan dengan 5.500 lowongan kerja.

ANTARA FOTO/OKSI SHANTHAPICOL

Di Bidang Perikanan

Pemerintah Tak Serius Bela Anak Buah Kapal Nelayan

Kebijakan perikanan Indonesia dinilai belum berdampak positif bagi perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) Nelayan.

HAL ini ditegaskan Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata. Setidaknya, ada empat temuan lapangan dari situasi pekerja ABK Nelayan.

Temuan ini menunjukkan, kebijakan perikanan terhadap perlindungan nelayan ABK kapal perikanan di atas 10 GT tidak berdampak positif terhadap perlindungan ABK Nelayan.

"Padahal, berdasarkan penelusuran KNTI, ada tujuh peraturan yang mengikat komitmen pemerintah, untuk memastikan berjalannya perlindungan pekerja perikanan sebagai ABK Nelayan," ujarnya.

Bentuk model bagi hasil perikanan belum sesuai ketentuan bagi hasil perikanan. Padahal ini telah diatur sejak UU No. 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang mengatur pembagian 40% hasil bersih pendapatan diperuntukkan bagi ABK Nelayan.

Menurut Marthin, ini menunjukkan, pemerintah masih membiarkan lemahnya perlindungan ekonomi dari ABK Nelayan. Di samping konteks pengawasan dan syarat perizinan yang tidak ditegakkan.

Ketiga, minimnya asuransi perikanan bagi ABK Nelayan. Padahal, usaha perikanan telah dinyatakan bersama sebagai profesi yang tinggi risiko ancaman kecelakaan laut. "Tapi hal tersebut tidak mendorong asuransi perikanan diberikan kepada

ABK Nelayan," ujarnya.

Kempat, pendekatan HAM yang terus digugurkan Pemerintah seolah hanya di atas kertas. Di lapangan, jelas Marthin, perusahaan tidak mengetahui berbagai kebijakan terkait sertifikasi hak asasi manusia untuk usaha perikanan.

Di arah yang sama, perusahaan tidak dalam pandangan yang sama untuk menerapkan hak asasi manusia dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menghormati dan melindungi hak asasi ABK Nelayan.

Akibatnya, meski banyak kebijakan, namun tidak semua kesejahteraan ABK Nelayan jadi lebih baik. Minimnya implementasi dan pengawasan lapangan dari peraturan tersebut, menunjukkan tak ada inovasi

implementasi kebijakan oleh Pemerintah di lapangan.

Ditambah lagi, kebijakan perlindungan ABK Nelayan yang substansial dan mendasar, belum terintegrasi dalam sistem perizinan perikanan usaha perikanan. Seperti kewajiban adanya perjanjian kerja laut dan asuransi perikanan tadi.

Di sisi lain, situasi perizinan yang terhambat masalah akses perizinan secara daring (online) mendorong pemerintah daerah mengambil jalan pintas melalui Surat Keterangan Melaut (SKM). "SKM ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan baru. Misalnya dalam verifikasi berbagai syarat perizinan. Termasuk mark down ukuran kapal sebagai salah satu masalah umum yang telah lama diemakan," tutup Marthin. ■ JON

Dewan Semakin Tidak Dipercaya

KEPERCAYAAN publik terhadap lembaga legislatif di daerah dan di Senayan nyussep. Gara-garanya, kian seringnya para wakil rakyat tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas dugaan korupsi.

Pakar Hukum Kaspidin Nor mengatakan, kejadian dugaan korupsi berjanjiah ini, merupakan kegagalan partai politik melahirkan kader pemimpin bangsa. "Mestinya partai politik malu dan prihatin, lalu bertanggung jawab atas perilaku para oknum kader itu," ujarnya.

Mantan Komisiner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini mengatakan, ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur sebagai tersangka dugaan korupsi KPK, sangat mencoreng institusi perwakilan rakyat di mata publik.

"Peristiwa vulgar ini diperlihatkan kepada rakyat. Kejadian ini bisa memicu semakin bertambahnya ketidakpercayaan publik pada para wakil rakyat," ujarnya.

Seharusnya, kata Kaspidin, parpol yang kadernya terlibat korupsi, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Karena telah mengendorkan kadernya untuk disodorkan pada masyarakat dalam pileg.

"Sehingga rakyat tidak lagi mampu memilih wakil rakyat yang benar-benar terjamin integritas dan profesionalnya. Padahal, wakil rakyat harusnya benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, bangsa dan negara ini," ujarnya.

Ke depan, lanjut Kaspidin, dalam mengasung calon wakil rakyat, parpol perlu menyeleksi ketat. Bila perlu, melakukan penelitian khusus (Litsum). "Terjadinya korupsi juga karena, lemahnya peran lembaga pengawasan formal yang ada. Baik pengawasan internal dan eksternal," bebernya.

Karena itu, Kaspidin juga menekankan, peran KPK dalam berwenang dalam penindakan juga perlu punya kewenangan dalam bidang pengawasan. Sebab, dengan berhasilnya KPK membongkar kasus dugaan korupsi musnah, harus mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat.

"KPK juga bahkan perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan edukasi, atau moral bangsa untuk agar malu korupsi," harapnya.

Lebih jauh Kaspidin menjelaskan, dalam sistem demokrasi sekarang, memilih pemimpin dalam pemberantasan korupsi, juga dibutuhkan peran partai politik dan masyarakat. Karena korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Karena dapat merusak tatanan sendi berbangsa dan bernegara.

"Rusaknya sistem dan moral masyarakat, bisa berdampak pada kemiskinan dan terganggunya stabilitas kenayaman sosial. Hingga hilangnya kepercayaan publik kepada para pejabat negeri ini," ingatnya.

Kaspidin menambahkan, sebaiknya sebagai efek jera bagi partai yang kadernya paling banyak korupsi, mesti dilakukan dekalifikasi untuk tidak ikut pileg. Tidak bisa ikut pilkada dan pilpres. ■ JON



ANTARA FOTO/OKSI SHANTHAPICOL

BERSIHKAN PANTAI: Warga mengikuti aksi bersih sampah dalam rangkaian kegiatan World Cleanup Day, di Pantai Kuta, Badung, Bali, kemarin. World Cleanup Day di Bali diikuti sekitar 17 ribu warga dari berbagai komunitas dan lembaga yang tersebar di 29 titik di seluruh wilayah pulau Dewata.

Khawatir Jadi Fitnah

Rizal Ramli Baiknya Berikan Klarifikasi

MANTAN Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tidak mengubah gaya komunikasinya.

Sebab, gayanya yang asal menuduh, bisa menimbulkan fitnah dan merugikan seseorang. Seperti yang menimpa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Aktivis dan pengamat politik Ray Rangku memperkirakan, pernyataan Rizal yang asal menuduh, bertujuan menancing atau menarik perhatian masyarakat. Namun, katanya, jika hal itu tidak dibuktikan dengan fakta dan data, malah bisa menyebabkan fitnah.

"Tapi di luar batas. Tetapi, apakah itu fitnah, Rizal Ramli tinggal jelaskan saja, benar apa tidak," kata Ray.

Menurutnya, Rizal perlu mengklarifikasi tuduhannya. Agar masyarakat tidak kebingungan.



Ray Rangku

ngan. Dia juga mengimbau Rizal mengedepankan bukti setiap memberikan pernyataan. "Paling tepat dalam mengukur adalah, apakah pernyataan itu mengandung kebenaran atau tidak," ujarnya.

"Untuk menutup website dari luar negeri, Pemerintah seharusnya dapat meminta bantuan kepada negara lain," ujarnya. ■ JON

Judi Online Negeri Kudu Dijegal Tuh

MAHASISWA yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) melakukan pengawalan penjagaan nusuhah moral yang terjadi lewat alat-alat online.

Ketua Pengurus Wilayah Semmi Jawa Timur, Abdullah Amas mengatakan, upaya tersebut dilakukan karena informasi anoral dan judi online semakin merebak. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya membentuk Posko Pelaporan Judi Online.

Kami juga akan melakukan sosialisasi memerangi judi online. Nanti bentuknya stiker, kaos, dan lain lain," ujar Abdullah.

Selain itu, Semmi juga akan memperlebar kerja sama bersama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

"Sebagai sayap organisasi besar Syarikat Islam, Semmi tentu harus aktif mengawal moralitas dan kualitas bangsa. Posko Pengaduan Judi Online Jawa Timur pertama akan dibentuk di sekretariat Semmi Jawa Timur," ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) meng-

gelar acara Ngobrol Bersama Anak Bangsa (NGOBAS) Indonesia. Bertema Matinya Revolusi Mental dan Maraknya Judi Online, acara ini menghadirkan narasumber seperti Agus dari Cyber Crime Mabes Polri, Dede Peradana dari PB HMI, dan Ustad Akmal Rusli dari Mitra Dai Indonesia.

M Saputra Adhi Lesmana selaku penyelenggara diskusi tersebut menyampaikan, pihaknya menilai, kinerja pemerintahan masih belum berhasil.

Sementara itu, Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri Agus menambahkan, Polri telah bekerja keras menanggulangi judi online.

Baik dengan menutup atau memblokir akses ke website judi online. "Ini sudah kami lakukan, meski masih belum maksimal," ujarnya.

Agus mengatakan, judi online ini sudah dilarang secara hukum. Polri juga berupaya menangkap bandar judinya. Sayangnya, banyak server atau website yang dibuat dari luar negeri.

Ustad Akmal Rusli dari Pimpinan Pusat Mitra Dai menambahkan, dalam pandangan Islam, judi dalam bentuk apapun sangat haram dilakukan.

"Karena hal inilah yang sesungguhnya merusak mental anak bangsa. Saya rasa revolusi men-

tal akan gagal jika pemerintah tak dapat menutup akses judi online dan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah khususnya Polri yang menjalankan operasi mental dalam memerantas judi online," ujarnya.

Sedangkan Ustad Akmal Rusli menilai, pemerintah seharusnya melakukan tindakan tegas dalam kasus ini. Dia bahkan khawatir, jangan-jangan ada campur tangan oknum Pemerintah atau lembaga lain. Karena judi online masih tetap subur.

"Untuk menutup website dari luar negeri, Pemerintah seharusnya dapat meminta bantuan kepada negara lain," ujarnya. ■ JON

53699507
53671716
5353156

PALEAS GERA
IKLAN
ANDA

Cendekiawan Muslim: Antara Teori & Tindakan Praksis (3)

Farid Esack Dan Muhammad Yunus



AYANG UTIRIZA YAKIN MA, PHD
Dosen FSH UN Jakarta,
Wakil-Ketua LTM-PIBU,
dan Peneliti Psikodoktor
Universite Catholique de
Louvain (JCLouvain),
Belgia

MELIHAT kasus cendekiawan Muslim teoritis ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa mereka menjadi cendekiawan mengambang yang tak berpijak dalam kehidupan nyata. Mungkin, ada baiknya kita belajar dari pengalaman para cendekiawan Muslim praksis, seperti Farid Esack dan Muhammad Yunus. Mereka berdua adalah para cendekiawan Muslim asal Afrika Selatan dan Bangladesh, yang mengembangkan wacana Islam pro-rakyat terdidasar di kalangan akademisi. Tapi di saat yang sama, juga terlibat dalam perjuangan kehidupan rakyat sehari-hari.

Farid Esack berjuang menumbangkan rejim apartheid yang sedang berkuasa di Afrika Selatan. Setelah 8 tahun belajar di Pakistan, Esack pulang ke kampung halamannya pada 1982, dan langsung terjun membela rakyatnya yang terdidasar oleh struktur pemerintahan yang zalim. Melalui organisasinya, yaitu gerakan Islam Progressif, The Call of Islam, Esack mengadvokasi masyarakat dan melakukan perlawanan yang tak kenal lelah melalui perjuangan tanpa kekerasan. Ia membangun aliansi strategis dengan umat

umat beragama lain: Kristen, Yahudi, dan Atheis sekalipun. Perlawanannya terhadap rezim apartheid didasarkan atas keyakinan bahwa, tujuan Akhbar adalah menegakkan keadilan dan membebaskan yang terdidasar.

Perjuangan Esack dengan kenyataan obyektif masyarakat Afrika Selatan dan pemikiran keagamaannya menghasilkan sebuah karya: Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression (1997).

Buku Esack ini adalah kerangka bangunan pikirannya dalam membangun kerjasama antarumat beragama menentang penindasan. Ia menjadi landasan Esack berjuang melawan kezaliman, mengembangkan pluralisme, dan toleransi antarumat beragama. Esack adalah salah satu contoh yang dapat mengawinkan antara pemikiran dan aktivitasnya sebagai sarjana Islam dan perjuangannya membela kondisi obyektif masyarakatnya.

Sementara Peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, mampu mengaitkan kemiskinan di negerinya, adalah juga contoh par excellence. Ia seorang yang dapat memadukan pemikiran sebagai akademisi intelektual, Professor Ekonomi pada sebuah universitas di Dhaka, dan aktivitasnya mengaitkan kemiskinan sebagai bentuk kepeduliannya memberantas kemiskinan dan menghancurkan sistem tungkuk yang mengaisap perekonomian Bangladesh lewat Bank Grameen yang didirikannya.

Keduanya menjadi teladan sebagai cendekiawan Muslim praksis yang membicarakan gagasan-gagasan mereka untuk mengubah dan memberikan arti masyarakat di mana ia hidup. ■ Beresambung

Advokat Kudu Jaga Toleransi

PARA advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) diharapkan punya idealisme dalam menjalankan profesinya. Bukan semata kekayaan, tapi juga membela kebenaran dan keadilan serta pengabdian kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat KAI Rusdi Tahir, saat memberikan sambutan pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) KAI, Rabu (12/9) lalu di Bogor, Jawa Barat. Rakerda bertema DPD KAI DKI Siap Menyambut Tahun Politik 2019 ini, juga dihadiri Ketua DPD KAI DKI Ardi Mubalembout serta para pengurus KAI DKI.

"Saat ini sudah sangat jarang advokat bersikap demikian. Namun ini semata agar advokat KAI memiliki rasa patriotisme yang tinggi. Tak kenal lelah menjadi advokat pejuang dan pejuang advokat," harapnya.

Model seperti ini dan harus menjadi teladan para advokat, lanjut Rusdi, sebenarnya su-

dah dipelopori oleh Presiden KAI sebelumnya, almarhum H Indra Sahnon Lubis. Selain itu, lanjutnya, advokat harus memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Mengingat bangsa ini memiliki banyak perbedaan agama, suku, maupun golongan.

"Jangan tersentak-sekat oleh perbedaan. Apalagi di tahun politik ini, kita senantiasa harus mengembangkan jiwa yang besar dalam menerima perbedaan," pinta mantan Kajati DKI Jakarta ini.

Tak cuma itu, ujar Rusdi lagi, advokat juga harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Karena kepentingan nasional, masyarakat, bangsa dan negara harus di atas segala-galanya. Bukan mencontoh advokat yang hedonis, yang mendedakan kemewahan. "Jadilah advokat yang baik, memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Rizki itu Allah yang atur," saran mantan anggota DPR/MPR RI ini. ■ JON



TENDANG: Sejumlah polisi melakukan simulasi pengamanan kota di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Sissam-kota tersebut merupakan bagian dari Lalapras Manlap Brata Candi 2018 sebagai persiapan pengamanan Pemilu 2019.

ANTARA FOTO/DHARMAKARYA

Pemerintah Harus Hati-hati

Waspadalah, Jangan Sampai NKRI Seperti Irak Dan Syuriah

Sejak Pilkada 2017 hingga sekarang mau Pemilu dan Pilpres, politik di Tanah Air terus memanaskan bahkan telah mengoyak eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.

KESIMPULAN itu disampaikan Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba & Tawuran (Gepenta) Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

"Pancasila sudah dicela oleh orang yang tidak menerima sebagai dasar NKRI walaupun diketahui bahwa Pendiri Bangsa dan Negara Indonesia adalah tokoh-tokoh Islam," kata Parasian di kantor Gepenta, Jakarta.

Dia mengaitkan kita menoleh kejadian di Suriah dan Irak terkait terjadinya pemberontakan yang berdalih Khilafah. Suriah dan Irak adalah Negara beradaban Islam kemudian muncul kelompok fundamentalis ingin membuat dan megakkan beberapa negara



Parasian Simanungkalit

membuat slogan itu melakukan pemberontakan. Makaluluhan taklah kota-kota di Suriah yang juga merambah ke Iraq. Oleh karena itulah, dia meminta KPU dan Bawaslu segera menghentikan kampanye

#2019GantiPresiden. "Pemerintah dengan aparatnya BIN, Bais, Baintelkam, serta TNI dan Polri dan rakyat Indonesia harus secara dini mencegah terjadinya pemberontakan dalam Negeri," pintanya.

Dia berharap, jangan sampai terlena. Harus waspada apa sudah ada kelompok yang memiliki senjata api? Kalau ada harus diupak dari sekarang. Jangan seperti di Suriah dan Irak. Awalnya pemberontakan hanya memiliki senjata tajam. Setelah pemberontakan dimulai maka negara-negara lain pun ikut memasuki senjata berat untuk menggulingkan Pemerintahan.

"Nah kalau perbuatan dan tindakan seperti ini terjadi di sini dan tidak terdeteksi secara dini oleh aparat intelijen, maka jelas sudah terlambat. Penyesalan akan tidak ada gunanya. Mengapa demikian karena di Indonesia rawan pm-

berontakan dan mungkin bisa terulang seperti pemberontakan PKI Muso, pemberontakan Kartosuwiryo, Kahar Muzakkar, PRRI/Permesta dan G30S PKI," katanya memperingatkan.

Karena itu, dia berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian melakukan pembinaan wilayah. TNI melakukan pembinaan teritorial untuk menciptakan kesiapan rakyat dalam Bela Negara. Demikian juga Polri melakukan pembinaan masyarakat agar rakyat menjadi kekuatan deteksi dini terhadap adanya ajakan kelompok tertentu yang akan melakukan pemberontakan terhadap negara.

"Kemudian dan Polri diharapkan membentuk seluruh rakyat Indonesia untuk turut dalam upaya dan usaha Pemerintah mempersiapkan kekuatan: Pertahanan NKRI dengan Perlawanan Rakyat Semesta," tuturnya. ■ JON



DORONG BOLA DUNIA: Warga mendorong replika bola dunia raksasa saat memperingati Hari Ozon Sedunia di Bundaran HI, Jakarta, kemarin. Kegiatan tersebut untuk mengkampanyekan perilaku ramah ozon.

KPAI: Aturan Label Susu Kental Manis Harus 1 Pintu

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, Kementerian Kesehatan tidak perlu lagi mengatur label dan iklan susu kental manis untuk menghindari tumpang tindih aturan. Produk tersebut kini sudah diawasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini dijelaskan Komisioner KPAI Siti Hikmahawaty, Kementerian Kesehatan, Selasa, 11 September 2018. "Pembayannya dari Muhammadiyah dan mereka yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya."

Selidaknya terdapat 12 poin yang akan direvisi, termasuk batasan kewenangan Kementerian Kesehatan dan BPOM agar tak tumpang tindih. Nantinya, kewenangan yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya.

Aturan mengenai label merujuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Siti, rencana Undang-Undang Pangan akan direvisi untuk memperjelas batasan kewenangan Kementerian Kesehatan dan BPOM agar tak tumpang tindih. Nantinya, kewenangan yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya.

Selidaknya terdapat 12 poin yang akan direvisi, termasuk batasan kewenangan Kementerian Kesehatan dan BPOM agar tak tumpang tindih. Nantinya, kewenangan yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya.

Sementara fasilitator pengembangan rumah sakit, Molt Saibin, mengatakan, untuk menambah dan memperbaharui peralatan, RS Muhammadiyah Taman Puring berencana membangun gedung baru. "Pembayarnya dari Muhammadiyah dan mereka yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya."

Menurut dia, hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur atau memberikan kepastian kepada semua pihak. Khusus pengaturan susu kental manis, pemerintah boleh saja memberikan kepastian hukum kepada konsumen terkait materi produk dan pengaturannya terhadap kesehatan.

"Namun pemerintah juga harus memberikan kepastian bisnis pada pelaku usaha, sehingga ada perlakuan yang adil bagi semua pihak," tegas Ricardo.

Menurutnya, pelaku usaha tidak akan memproduksi barang berbahaya atau melanggar ketentuan sepanjang aturan dibuat jelas dan tidak berubah-ubah. Peraturan yang jelas akan memberikan kepastian hukum dalam berbisnis.

"Jangan sampai hal yang boleh dilakukan pelaku usaha tahun ini, tetapi tahun depan tidak bisa lagi. Aturan dibuat bukan untuk mempersulit tetapi mempermudah. Mempermudah bukan berarti semuanya boleh dilakukan, tetapi ada fair treatment pada semua pihak baik konsumen maupun produsen," kata dia.

Ricardo menjelaskan, konsumen dan produsen merupakan dua pihak yang saling membutuhkan. Sehingga mereka harus dilindungi pemerintah. Pemerintah juga harus memaham secara jelas latar belakang perubahan aturan sehingga tidak terjadi distorsi.

BPOM berencana revisi aturan terkait labelisasi dan iklan produk pangan yang di dalamnya mengatur susu kental manis. Sebelumnya, BPOM telah menerbitkan surat edaran mengenai label dan iklan susu kental manis pada Mei 2018. Selama ini, susu kental manis termasuk susu untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen agar tidak ada yang diuntungkan. ■ JON

Muhammadiyah Bangun RS Modern Pancasila

Ekonomi Umat Tak Boleh Dipisah Dari Nilai Pancasila

MEMBANGKITKAN ekonomi umat Islam, tak boleh dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Keduanya bahkan mesti dipadu, demi membantu pemerhati di bidang kesehatan. Salah satunya, itu bisa diwujudkan dengan membangun rumah sakit (RS) modern yang berjiwa Islami.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan coffe morning yang diselenggarakan Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Kegiatan itu sekaligus untuk menyambut kunjungan anggota DPR/MPR RI, Dr Hidayat Nur Wahid.

Direktur RS Muhammadiyah Taman Puring, Dr H Tjetjep Permana Dajusman mengatakan, selama ini, pihaknya selalu mengaitkan nilai-nilai Islam

dan kemuhmadiyah dalam pembangunan pelayanan prima dan paripurna. "RS Muhammadiyah akan menambah dan memperbaharui peralatan, RS Muhammadiyah Taman Puring mengenai pengembangan rumah sakit menjadi rumah sakit modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila," tandasnya.

Di saat yang sama, Hidayat juga mengatakan materi Penerapan Jiwa dan Nilai Pancasila untuk diterapkan kepada pekerja kesehatan. Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyatakan penghargaan terhadap RS Muhammadiyah Taman Puring. Karena berkontribusi pada layanan prima, namun dengan tetap mengedepankan jiwa dan nilai Pancasila.

Terkait hal ini, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kebayoran Baru, Edi Sukardi menyatakan, untuk menambah dan memperbaharui peralatan, RS Muhammadiyah Taman Puring berencana membangun gedung baru. "Pembayarnya dari Muhammadiyah dan mereka yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya."

Sementara fasilitator pengembangan rumah sakit, Molt Saibin, mengatakan, untuk menambah dan memperbaharui peralatan, RS Muhammadiyah Taman Puring berencana membangun gedung baru. "Pembayarnya dari Muhammadiyah dan mereka yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya."

Sementara fasilitator pengembangan rumah sakit, Molt Saibin, mengatakan, untuk menambah dan memperbaharui peralatan, RS Muhammadiyah Taman Puring berencana membangun gedung baru. "Pembayarnya dari Muhammadiyah dan mereka yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya."

Sementara fasilitator pengembangan rumah sakit, Molt Saibin, mengatakan, untuk menambah dan memperbaharui peralatan, RS Muhammadiyah Taman Puring berencana membangun gedung baru. "Pembayarnya dari Muhammadiyah dan mereka yang sudah dijalankan BPOM tidak perlu lagi dijalankan Kementerian Kesehatan, demikian pula sebaliknya."

Kemampuan Menyusun
DISERTASI, TESIS, SKRIPSI
Hub: MAGNAScript School of Research
Pusat Bimbingan Disertasi/Tesis/Skripsi
Jl. Kawang Raya CC-4, Rawaningsari, Jakarta Timur 13320
Telp. (021) 4718773, 0817990966, 0816066123, 0876837540
■ Berbagai pelayanan, ruang AC, simulasi ujian
■ Berhasil membantu penuntasan > 1.350 disertasi, tesis, dan skripsi dengan yudisium memuaskan dan cum laude
● Sejak 2001 hadir menemani pengait

BANYAK BERITA HOAX!
LANGGANAN AJA
Rakyat Merdeka
Info Berlangganan
021-536 99507 021-536 74444
#RakyatMerdeka #BeritaHoax

